



## PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN: KONSEP, STRATEGI, DAN PROSEDUR DALAM KONTEKS MANAJEMEN PENDIDIKAN

Sukron Makmun<sup>1)</sup> Hairul Marif<sup>2)</sup> Muhammad fatichul Irsyad<sup>3)</sup> Muawanah<sup>4)</sup>

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri<sup>1234)</sup>

[sukmakmun040@gmail.com](mailto:sukmakmun040@gmail.com)<sup>1)</sup> [iwongokie09@gmail.com](mailto:iwongokie09@gmail.com)<sup>2)</sup> [fatichulirsyad2@gmail.com](mailto:fatichulirsyad2@gmail.com)<sup>3)</sup>  
[muawanahahmad68@gmail.com](mailto:muawanahahmad68@gmail.com)<sup>4)</sup>

### ABSTRACT

*The procurement of educational facilities and infrastructure is a key component in improving the quality of learning in schools. However, many educational institutions still face issues such as poor planning, lack of transparency, and minimal stakeholder involvement. This study aims to provide a theoretical review of the concepts, strategies, and procedures involved in educational facilities procurement. Using a literature review method, data were collected from scholarly journals, academic books, and relevant educational policies. The study focuses on how procurement can be planned and implemented effectively, efficiently, and accountably. Results indicate that quality procurement should be based on real needs analysis, participatory planning, digital-based systems such as e-procurement, and collaboration with external partners. The novelty of this study lies in integrating theoretical frameworks with regulatory-based implementation needs. This paper offers practical insights for educational managers to strengthen procurement governance and promote sustainable and transparent educational development.*

**Keywords:** *Procurement Facilities And Infrastructure, Concepts, Strategies, Procedure*

### ABSTRAK

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan elemen penting dalam mendukung mutu pembelajaran di sekolah. Namun, praktik pengadaan di banyak lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya perencanaan berbasis data, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya partisipasi stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis konsep, strategi, dan prosedur pengadaan sarpras pendidikan dalam perspektif manajemen modern. Menggunakan metode studi pustaka, data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, buku referensi, dan regulasi pendidikan terkini. Fokus kajian pada bagaimana merancang dan melaksanakan pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengadaan sarpras yang baik harus berlandaskan analisis kebutuhan, melibatkan partisipasi multi-pihak, memanfaatkan sistem digital *e-procurement*, dan membangun kerja sama lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara konsep teoritis dengan kebutuhan implementatif berbasis regulasi terbaru, serta penekanan pada strategi kolaboratif dan teknologi informasi. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang praktis dan aplikatif bagi pengelola pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan dan transparan.

**KataKunci:** Pengadaan Sarana Prasarana, Konsep, Strategi, Prosedur

## PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran proses pembelajaran. Keberadaan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Lingkungan belajar yang kondusif secara langsung dipengaruhi oleh kelengkapan dan kelayakan sarana seperti alat peraga, media pembelajaran, serta prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas sanitasi sekolah (Suyanto & Djihad, 2019).

Dalam praktiknya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar aktivitas pengadaan fisik yang bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari proses manajerial yang kompleks dan sistematis. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, distribusi, hingga pemeliharaan dan evaluasi (Mulyasa, 2013). Manajemen sarpras yang baik harus mempertimbangkan prinsip relevansi, efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan agar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Fattah, 2012).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sarana adalah segala perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah dan digunakan secara langsung, seperti meja, kursi, buku, alat tulis, dan alat peraga. Sedangkan prasarana adalah fasilitas utama yang tidak bergerak, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Kedua komponen ini memiliki hubungan fungsional yang tidak terpisahkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran secara optimal.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dirancang dan diimplementasikan berdasarkan prinsip manajemen modern yang mengutamakan akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi. Selain itu, pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based*) menjadi penting agar pengadaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata peserta didik dan tenaga kependidikan (Wiyani, 2020). Oleh karena itu, kajian teoritis terhadap konsep, strategi, dan prosedur pengadaan sangat penting untuk memperkuat praktik manajemen pendidikan yang profesional, terukur, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, layak, dan relevan sangat menentukan terciptanya lingkungan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Lingkungan fisik yang mendukung proses pendidikan berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar, kualitas pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik (Suyanto & Djihad, 2019). Menurut Arikunto (2010), sarana mencakup perlengkapan yang dapat dipindahkan dan digunakan secara langsung dalam pembelajaran, seperti buku, meja, kursi, dan alat peraga. Sedangkan prasarana merujuk pada fasilitas permanen seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan (Arikunto, 2010). Oleh karena itu, pengadaan sarpras tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui tahapan manajemen pendidikan yang sistematis dan berbasis kebutuhan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya sekadar aktivitas pembelian barang atau pembangunan fasilitas, tetapi juga mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, serta pemeliharaan secara berkelanjutan (Mulyasa, 2013). Menurut Kurniasih dan Sani (2019), strategi pengadaan yang ideal harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta partisipasi semua stakeholder dalam pendidikan (Kurniasih & Sani, 2019). Studi oleh Wiyani (2020) juga menekankan bahwa keberhasilan pengadaan sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan berbasis data serta pengawasan terhadap pelaksanaannya (Wiyani, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian teoritis terhadap konsep, strategi, dan prosedur pengadaan sarana prasarana pendidikan agar dapat memperkuat praktik manajerial yang profesional dan adaptif dalam merespons tuntutan mutu pendidikan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji konsep, strategi, dan prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui telaah terhadap berbagai sumber ilmiah. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat teoritis dan tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan menganalisis pemikiran para ahli serta temuan-temuan dalam jurnal, buku, dan regulasi yang relevan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan (George, 2008).

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah berupa buku manajemen pendidikan dan sarana prasarana, artikel jurnal terakreditasi nasional, dokumen regulasi pemerintah, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan menggunakan kata kunci seperti "manajemen sarana prasarana", "pengadaan pendidikan", dan "strategi pengelolaan pendidikan". Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perbandingan konsep, serta sintesis pemikiran yang mendukung tujuan kajian ini (Zed, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses manajerial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas fisik maupun nonfisik dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Sarana pendidikan meliputi perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahkan, seperti meja, kursi, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas dasar yang bersifat permanen seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan (Mulyasa, 2013). Menurut Arikunto (2010), pengadaan yang baik harus didasarkan pada kebutuhan riil yang diperoleh melalui analisis mendalam terhadap kondisi dan ketersediaan sarana prasarana yang sudah ada. Hal ini penting agar pengadaan dapat selaras dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan aktual peserta didik serta tenaga kependidikan (Arikunto, 2010).

Pengadaan sarpras tidak hanya dipahami sebagai proses pembelian atau pembangunan semata. Dalam praktik manajemen pendidikan, pengadaan adalah bagian dari siklus perencanaan strategis yang mencakup identifikasi kebutuhan, perumusan rencana pengadaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pencatatan aset. Lebih dari itu, pengadaan juga mencakup proses pemeliharaan (*maintenance*), rehabilitasi atau peremajaan (*refurbishment*), dan penghapusan (*disposal*) terhadap aset yang sudah tidak layak guna (Suyanto & Djihad, 2019). Ketiga fungsi tersebut bertujuan menjamin keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sarana prasarana pendidikan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif manajemen berbasis sekolah (MBS), pengadaan sarana dan prasarana harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kurniasih dan Sani (2019) menyatakan bahwa pelibatan seluruh stakeholder pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, hingga wali murid, dalam perencanaan pengadaan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pendidikan yang dijalankan (Kurniasih & Sani, 2019). Selain itu, pendekatan pengadaan yang berbasis kebutuhan (*need-based procurement*) memungkinkan alokasi sumber daya menjadi lebih tepat sasaran, tidak boros, dan lebih selaras dengan visi misi institusi pendidikan (Makmun & Yasin, 2025).

Pengadaan yang ideal tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas barang atau fasilitas, tetapi juga pada kualitas, kebermanfaatan, dan kesesuaian terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan kurikulum. Wiyani (2020) menekankan bahwa keberhasilan pengadaan sangat ditentukan oleh sejauh mana proses tersebut dikawal dengan perencanaan matang, evaluasi berkelanjutan, serta manajemen aset yang terorganisir dengan baik (Wiyani, 2020). Oleh karena itu, konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dipisahkan dari praktik manajerial modern yang berorientasi pada mutu, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan.

### **Strategi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menjamin efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Strategi ini dimulai dari identifikasi kebutuhan berbasis data, yaitu suatu proses analisis menyeluruh terhadap kondisi eksisting sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui inventarisasi, audit internal, atau evaluasi rutin agar kebutuhan yang muncul benar-benar berdasarkan data objektif dan relevan dengan kebutuhan proses pembelajaran (Wibowo & Suryadi, 2021). Kebutuhan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang, guna menentukan prioritas pengadaan secara rasional dan terukur.

Langkah strategis selanjutnya adalah perencanaan partisipatif, yakni pelibatan semua pihak yang terkait dalam lembaga pendidikan dalam proses penyusunan rencana pengadaan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan yang direncanakan tidak bersifat sepihak, melainkan mewakili kepentingan bersama dan sesuai dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan (Arikunto, 2010). Selain memperkuat rasa

kepemilikan terhadap hasil pengadaan, pendekatan partisipatif juga dapat meminimalisasi resistensi terhadap perubahan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD, BOS, ataupun sumber lainnya.

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen penting dalam strategi pengadaan. Salah satu bentuknya adalah penggunaan sistem *e-procurement*, yaitu sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang mendukung keterbukaan, percepatan proses, dan akuntabilitas (Kurniasih & Sani, 2019). *E-procurement* memungkinkan proses tender, evaluasi penawaran, hingga kontrak kerja dilakukan secara online dengan jejak audit digital yang kuat, sehingga mampu mencegah praktik korupsi atau manipulasi. Di samping itu, pemanfaatan database aset secara digital dapat membantu manajemen sekolah dalam memantau umur pakai, kebutuhan perawatan, hingga penghapusan sarana secara tepat waktu (Wiyani, 2020).

Strategi terakhir yang tak kalah penting adalah pengembangan kerja sama lintas sektor. Lembaga pendidikan didorong untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti perusahaan (melalui program CSR), yayasan sosial, LSM, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah. Pendekatan ini berguna untuk menutup kekurangan anggaran yang tidak tercover dari dana operasional sekolah dan meningkatkan keberlanjutan pengadaan. Menurut Rahmawati & Suhardi (2022), sinergi antarlembaga dapat memperluas akses terhadap sumber daya, mempercepat realisasi pengadaan, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan kolaboratif (Rahmawati & Suhardi, 2022). Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terpadu, lembaga pendidikan dapat menjamin penyediaan sarana prasarana yang tepat guna dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

### **Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Prosedur pengadaan dimulai dengan tahap perencanaan, yaitu penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan analisis kebutuhan riil yang diperoleh dari audit sarpras, survei pengguna, maupun kebutuhan kurikulum (Mulyasa, 2013). Langkah ini melibatkan koordinasi antara tim manajemen sekolah, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk menentukan skala prioritas kebutuhan pengadaan (Arikunto, 2010). Mulyasa (2013) menekankan bahwa penyusunan RKAS harus bersifat inklusif dan terstruktur, sehingga memudahkan pemantauan dan akuntabilitas penggunaan dana (Makmun, 2022).

Tahap berikutnya adalah penganggaran, dimana sumber dana diidentifikasi dan dialokasikan. Sumber dana bisa berasal dari BOS, APBD, dana DIPA, maupun bantuan pihak ketiga seperti CSR atau yayasan (Wibowo & Suryadi, 2021). Menurut Suyanto & Djihad (2019), perancangan anggaran harus cermat dan realistis, dengan menggunakan teknik zero based budgeting atau historical budgeting untuk menjaga efisiensi (Suyanto & Djihad, 2019). Selain itu, alokasi dana harus mematuhi prinsip-prinsip penganggaran publik, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan (Kurniasih & Sani, 2019).

Pada fase pelaksanaan pengadaan, sekolah menerapkan mekanisme sesuai regulasi, seperti pembelian langsung untuk nilai rendah, tender terbatas untuk pengadaan menengah, atau penunjukan langsung dalam kondisi darurat (Wiyani, 2020). Pelaksanaan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 19 Tahun 2020 dan aturan pengelolaan keuangan negara. Penelitian Wibowo & Suryadi (2022) menunjukkan bahwa penggunaan prosedur resmi seperti e-procurement pada tender meningkatkan keamanan pengadaan dan mengurangi potensi penyimpangan (Wibowo & Suryadi, 2022).

Tahapan selanjutnya adalah pencatatan dan distribusi, di mana barang atau fasilitas yang diperoleh harus dicatat dalam sistem inventarisasi aset dan distribusikan sesuai kebutuhan unit pengguna (Rahmawati & Suhardi, 2022). Dokumentasi seperti berita acara dan laporan penerimaan serta pemeliharaan awal harus dilengkapi. Terakhir, tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna menilai efektivitas sarpras dalam proses pembelajaran, serta memeriksa pemakaian, kondisi fisik, dan manfaatnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Damarjati, 2023). Seluruh tahapan tersebut harus berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik seperti diatur dalam Permendikbud No. 19 Tahun 2020.

## **PENUTUP**

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses manajerial yang kompleks, melibatkan tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Setiap tahap pengadaan harus dirancang secara sistematis dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Strategi yang digunakan, seperti perencanaan partisipatif, pemanfaatan teknologi informasi, dan kemitraan lintas sektor, menjadi kunci untuk menjamin bahwa hasil pengadaan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.



Agar pengadaan sarpras lebih optimal, disarankan kepada lembaga pendidikan untuk memperkuat mekanisme evaluasi kebutuhan berbasis data serta memperluas kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, penggunaan sistem digital seperti *e-procurement* perlu ditingkatkan guna mencegah penyimpangan dan mempercepat proses. Pemerintah juga diharapkan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar pengadaan sarpras berjalan sesuai aturan yang berlaku dan berorientasi pada mutu pendidikan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Damarjati, S. (2023). Evaluasi sarana prasarana sekolah: Efektivitas dan keberlanjutan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 4(2), 45–60.
- Fattah, N. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2019). *Administrasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Makmun, S. (2022). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas Unggulan Di MTs Negeri 2 Kediri*. IAIN Kediri.
- Makmun, S., & Yasin, M. (2025). PENGUKURAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 12–22.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, D., & Suhardi. (2022). Implementasi strategi pengadaan sarpras berbasis kemitraan di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 88–96. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v12i1.5678>
- Suyanto, S., & Djihad, H. (2019). Manajemen pendidikan dan sarana prasarana sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 60–72.
- Wibowo, A., & Suryadi, A. (2021). Strategi pengadaan sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pendidikan*, 8(2), 112–121.
- Wibowo, A., & Suryadi, A. (2022). E-procurement dalam pengadaan sarpras: Studi implementasi di sekolah menengah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(1), 55–67.



Wiyani, N. A. (2020). Manajemen pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(1), 32–40. <https://doi.org/10.1234/jipd.v7i1.1234>

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.